



Menilai penerapan *e-government* di Kementerian / Lembaga Negara Republik Indonesia menggunakan Framework PeGI

Irwan munandar
Balai Pendidikan dan Pelatihan
Tambang Bawah Tanah
Irwan@esdm.go.id

Ardye Amando Pratama
Faculty Of Computer Science
University Of Indonesia
Depok, Indonesia
ardye.ilkom@gmail.com

Deki Satria
Faculty Of Computer Science
University Of Indonesia
Depok, Indonesia
satriadeki@gmail.com

Abstrak— Kementerian/ lembaga pemerintah merupakan organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk bidang administrasi umum pemerintahan. Kementerian/ Lembaga Pemerintah mempunyai tugas khusus yaitu memiliki banyak sekali tanggung jawab terkait dengan kesejahteraan masyarakat sehingga memerlukan sebuah sistem layanan *e-government* yang mapan. Namun, peringkat dan hasil penilaian dari Kementerian/ lembaga pemerintah masih banyak yang kurang memenuhi standar. PeGI digunakan untuk menilai *e-government* dari lima dimensi, yaitu kebijakan, perencanaan, aplikasi, kelembagaan, dan infrastruktur.

Kata kunci— *e-government*, Indonesia, PeGI,

I. PENDAHULUAN

E-government merupakan pemanfaatan komputer dan internet oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyampaikan informasi dan layanan kepada masyarakat, bisnis, dan stakeholder lainnya [1]. *E-government* menggunakan IT seperti *wide area network*, internet, dan *mobile computation* untuk mentransformasi operasional pemerintah dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan organisasi terhadap informasi dan layanan pemerintah [2]. Di beberapa dekade terakhir, *e-government* mengalami peningkatan perhatian karena banyak pemerintah merealisasikan pentingnya dari penggunaan teknologi informasi

dan komunikasi dalam memberikan efisiensi dan transparansi pemerintahan [3] [4].

Di Indonesia *e-government* telah diterapkan di berbagai lembaga pemerintahan, provinsi, dan daerah untuk membantu pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi internal. Semua kementerian/ lembaga pemerintah telah menerapkannya yaitu terdiri dari Kementerian koordinator, kementerian, dan lembaga Negara[5]. Kementerian/ lembaga pemerintah Indonesia saat ini telah menerapkan *e-government* dalam menjalankan tugasnya, telah tersedia portal web yang menyediakan informasi berita, program dan layanan, serta sistem informasi guna membantu mereka dalam memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat.

Untuk melihat sejauh mana penerapan *e-government* perlu adanya evaluasi dan penilaian implementasi terkait *e-government*. Beberapa tahun terakhir Indonesia telah menerapkan evaluasi dan penilaian *e-government* tahunan yang dilakukan oleh Direktorat *e-government* Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diberi nama Peningkatan *e-government* Indonesia (PeGI). PeGI memiliki lima dimensi penilaian yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan [6]. Kegiatan PeGI telah menilai provinsi, daerah, dan lembaga pemerintahan di Indonesia. Pada tingkat Kementerian/ lembaga pemerintah, pada tahun 2014 terdapat 13 Kementerian yang masih kurang dalam penerapan *e-Government*nya, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 11 kementerian yang masih kurang dalam penilaiannya dengan nilai rata-rata dibawah 2.50,



dapat dilihat terdapat sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Sehingga perlu ditinjau lagi apakah di tahun selanjutnya Kementerian/lembaga pemerintah telah memperbaiki dimensi-dimensi PeGi mereka agar nilai PeGI mereka menjadi lebih baik.

II. LATAR BELAKANG DAN LITERATURE REVIEW

A. Pemingkatan *e-government* Indonesia (PeGI)

PeGi merupakan kegiatan penilaian *e-government* yang dilakukan oleh Direktorat *e-government* Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan berbagai kalangan baik unsur komunitas TIK, perguruan tinggi dan instansi pemerintah terkait. Kegiatan PeGI merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah, provinsi dan daerah secara nasional.

PeGI bertujuan untuk [6]:

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.
2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Terdapat lima dimensi dalam penilaian PeGI yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi dinilai dengan kriteria:

- 3.60 – 4.00 = Sangat Baik
- 2.60 – 3.60 = Baik
- 1.60 – 2.60 = Kurang
- 1.00 – 1.60 = Sangat Kurang

III. METODOLOGI

Data dikumpulkan dengan dua metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini, berdasarkan pada tahapan yang ada dalam pegi yaitu menggunakan kuesioner sebagai penilaian awal dan dilanjutkan dengan wawancara untuk memvalidasi isi dari kuesioner.

1) Kuesioner

PeGI menyediakan kuesioner yang dapat digunakan oleh penilai dan yang dinilai untuk

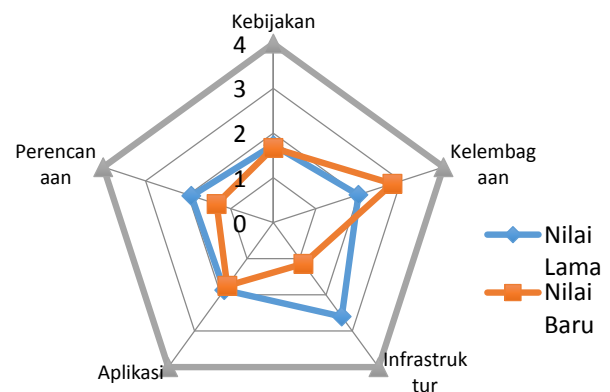
melakukan penilaian awal (*Self Assesment*) sebelum melakukan wawancara PeGI. Proses ini bertujuan agar pihak yang diwawancara dapat mempersiapkan bukti pada saat wawancara.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada stakeholder yang berada di kementerian/lembaga pemerintah. Pada saat wawancara dilakukan, data yang diberikan pada kuesioner divalidasi. Hasil validasi ini akan diisikan kedalam lembar penilaian PeGI yang berisi 5 kriteria yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan. Kelima faktor ini akan dinilai dengan menggunakan skala yang telah ditentukan oleh kerangka kerja PeGI.

IV. HASIL

Hasil penilaian PeGI berupa sebuah grafik radar yang menunjukkan keadaan institusi yang dinilai pada saat ini, dibandingkan dengan hasil penilaian sebelumnya. Contoh Hasil penilaian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Contoh Hasil PeGI

Hasil yang ditampilkan dalam gambar 1 merupakan nilai rata-rata dari point yang penilaian yang dilakukan. Pada setiap poin penilaian terdapat beberapa indikator penilaian. Setiap penilaian ini dinilai berdasarkan ada tidaknya bukti yang diberikan oleh pihak Kementerian/Lembaga Pemerintah. Kriteria penilaian untuk tiap poin dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1 Kriteria Penilaian

Poin	Kriteria
1	Belum Ada Sama Sekali



2	Ada Rencana dan dapat dibuktikan
3	Ada dan dilaksanakan, namun belum lengkap
4	Ada, Lengkap, dan diterapkan secara menyeluruh

Poin-poin ini diberikan berdasarkan hasil wawancara dan bisa tidaknya hasil tersebut dibuktikan dengan dokumen-dokumen terkait. Poin akan diberikan sesuai dengan kriteria pada table 1.

Satu poin akan diberikan jika pihak kementerian/lembaga pemerintah belum sama sekali memiliki apapun terkait dengan penilaian. Dua poin akan diberikan, jika pihak yang dinilai telah memiliki sebuah rencana namun belum dilaksanakan, serta dapat membuktikan dengan dokumentasi. Dokumentasi ini dapat berupa note dari pimpinan, artikel koran, atau dokumentasi lainnya. Tiga poin akan diberikan jika rencana yang ada telah dijalankan namun belum sepenuhnya diterapkan. Empat poin adalah poin tertinggi, dimana pihak yang dinilai telah menjalankan semua rencana, dan rencana tersebut telah didokumentasikan dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Hasil lengkap penilaian dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, salah satu contoh hasil yang didapatkan dari salah satu kementerian/lembaga yang ada di Indonesia, mendapatkan hasil seperti yang dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2 Hasil Penilaian salah satu kementerian/lembaga pemerintah Berdasarkan Poin PeGI

Data	Nilai Lama	Nilai Baru
Kebijakan	1.73	1.67
Kelembagaan	2.00	2.80
Infrastruktur	2.60	1.14
Aplikasi	1.87	1.75
Perencanaan	1.93	1.33
Total Penilaian	2.03	1.74

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap penilaian PeGI. Hasil penilaian ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

V. PEMBAHASAN

Kementerian/ lembaga negara sebagai sebuah instansi pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat sudah sepatutnya memiliki sistem pelayanan yang baik. Sistem pelayanan ini bisa merupakan pelayanan langsung, maupun menggunakan media, baik media sosial maupun eGovernment (Situs resmi pemerintah).

Kementerian/lembaga negara pemerintah sendiri telah memiliki halaman website sendiri dan masyarakat dapat menggunakan halaman ini untuk berkomunikasi dengan pihak kementerian/lembaga negara pemerintah. Namun halaman yang ada belum terlalu lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada halaman website milik Kementerian/lembaga negara pemerintah, banyak sekali layanan yang tidak terlalu informatif, hal inilah yang menyebabkan nilai penilaian aplikasi ini tidak memiliki peningkatan dari pada penilaian pada tahun sebelumnya. Kekurangan ini terlihat tidak menjadi sebuah kepedulian dari kementerian/ lembaga negara pemerintah.

Infrastruktur yang ada di kementerian/ lembaga negara pemerintah, pada contoh tabel 2 penilaian terlihat menurun dibandingkan dengan penilaian pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh perpindahan dari pusat data milik salah satu kementerian/ lembaga negara pemerintah dari gedung pusat ke gedung Pusat Data. Sehingga, tidak banyak hal yang bisa diperlihatkan oleh pihak kementerian ketika dilakukan wawancara.

Faktor perencanaan dalam hasil penilaian di salah satu kementerian ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini berkaitan erat dengan faktor kebijakan. Belum banyak kebijakan terkait IT yang dikeluarkan di salah satu kementerian/ lembaga negara pemerintah saat ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kebijakan atau hal sejenis yang mendukung pengembangan IT.



Kurangnya kebijakan ini, menunjukkan kurangnya komitmen pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal ini dalam pengembangan IT. Komitmen merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Komitmen merupakan sebuah kunci sukses dalam keinginan untuk berubah sebuah organisasi [7]. Komitmen ini dapat berupa perencanaan yang baik, pembuatan kebijakan, ataupun memo yang harus dilaksanakan oleh bawahannya.

Dari contoh hasil penilaian ini, terlihat bahwa hal utama yang harus ditingkatkan terlebih dahulu oleh pihak kementerian/ lembaga negara pemerintah bahwa pentingnya kesadaran untuk meningkatkan IT dan layanan eGov yang mereka miliki. Pendirian Pusat data dan teknologi informasi adalah salah satu contoh yang akan memudahkan kementerian/ lembaga negara pemerintah dalam melakukan pengembangan IT yang lebih baik. Pengembangan yang mereka lakukan akan lebih mudah untuk dipantau dan di evaluasi karena SOP yang diberikan pun jelas dan mudah untuk diterapkan. Sehingga proses yang dilakukan oleh pihak kementerian pun lebih terarah. Dengan didirikannya divisi yang tidak menginduk, maka dana yang dialokasikan pun akhirnya dapat lebih besar dan dapat mendukung kegiatan berbasis IT. Karena pada akhirnya komitmen pimpinanlah yang mendorong komitmen bawahannya untuk berubah [7].

VI. KESIMPULAN

Kementerian/ lembaga negara pemerintah merupakan organisasi khusus yang langsung berhubungan dengan masyarakat umum. Namun, kementerian/ lembaga negara pemerintah banyak yang tidak mengembangkan eGovernment mereka dengan baik sehingga menyulitkan masyarakat untuk dapat terhubung dengan pihak kementerian. Kementerian/ lembaga negara pemerintah yang poin penilainya masih dibawah 2,50 harus memperbaiki komitmen pimpinan yang mereka miliki. Komitmen pimpinan yang baik akan mengarahkan kementerian/ lembaga negara pemerintah dalam perubahan yang lebih baik. Komitmen ini dapat ditunjukkan dengan dibentuknya pembuatan kebijakan dan perundangan yang mendukung kegiatan IT dalam lingkungan Kementerian/ lembaga pemerintah Indonesia.

REFERENSI

- 1] T. Nam, "Determining the type of e-government use," *Government Information Quarterly*, vol. 31, no. 2, pp. 211-220, 2014.
- 2] D. R. Campeau dan H. C. A, "Computer self-efficacy: Development of measure and initial test," *Management Information System Quarterly*, vol. 19, no. 2, pp. 182-221, 1995.
- 3] Y. S. Wang dan Y. W. Liao, "Assesing eGovernment system success: a validation of the DeLone and McLean model of information success," *Government Information Quarterly*, vol. 25, no. 4, pp. 717-733, 2008.
- 4] D. Stefanovic, U. Marjanovic, M. Delic, D. Culibrk dan B. Lalic, "Assessing the success of e-government systems: An employee perspective," *Information & Management*, vol. 53, pp. 717-726, 2016.
- 5] K. S. N. R. I. "Portal Nasional Republik Indonesia," Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, [Online]. Available: <http://indonesia.go.id/in/kementerian/kementeria n/>. [Diakses 7 December 2016].
- 6] D. e.-g. "Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)," Direktorat e-Government, Ditjen. APTIKA – KEMKOMINFO RI, [Online]. Available: <http://pegi.layanan.go.id/tentang-pegi/>. [Diakses 7 December 2016].
- 7] C. Abrell-Vogel dan J. Rowold, "Leaders' commitment to change and their effectiveness in change a multilevel investigation," *Journal of Organizational Change*, vol. 27, no. 6, pp. 900-921, 2014.

**Lampiran****A. Draft kerangka Penilaian****1. Kebijakan**

No	Sub-Dimensi	Indikator	Status	Catatan
1	Perumusan Kebijakan	Adanya keterlibatan pimpinan tertinggi		
2	Visi dan Misi	Adanya Visi dan Misi berkaitan dengan TIK		
3	Strategi Penerapan	Adanya dokumen yang memuat strategi penerapan kebijakan TIK		
4	Pedoman	Adanya acuan-acuan untuk penerapan kebijakan TIK		
5	Peraturan	Adanya regulasi dan aturan lain yang berlaku terkait dengan TIK		
6	Ketetapan Instansi	Adanya keputusan ketetapan dari Pejabat Instansi		
7	Manajemen Risiko	Adanya manajemen resiko		
8	Skala Prioritas	Adanya penentuan prioritas dalam kebijakan TIK		
9	Audit	Adanya evaluasi internal dan independen		
Total Penilaian				

2. Kelembagaan

No	Sub-Dimensi	Indikator	Status	Catatan
1	Keberadaan Organisasi	Keberadaan organisasi yang mengelola IT		
2	Tupoksi	Tugas pokok yang dimiliki oleh unit pengelola TIK		
3	SOP	Ada tidaknya SOP yang mendukung operasional TIK di Departemen		
4	SDM	Ketersediaan dan kualitas SDM bidang TIK		
5	Pengembangan SDM	Keberadaan program pengembangan SDM bidang TIK		
Total Nilai				

3. Infrastruktur

No	Sub-Dimensi	Indikator	Status	Catatan
1	Data Center	Peranti keras server, sistem operasi, aplikasi		



		pendukung		
2	Jaringan Data	Liputan, ketersediaan, kapasitas dan akses Internet		
3	Keamanan	Peranti keras dan peranti lunak keamanan		
4	Fasilitas pendukung	Menjaga keamanan fisik, ketersediaan listrik, AC		
5	Disaster Recovery	Mitigasi dan rencana/prosedur penanggulangan insiden		
6	Pemeliharaan TIK	Adanya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur		
7	Inventaris Peralatan TIK	Adanya inventaris peralatan TIK dan sarana pendukung		
		Total Penilaian		

4. Aplikasi

No	Sub-Dimensi	Indikator	Status	Catatan
1	Situs web (homepage)	Penyediaan informasi, interaksi dengan publik		
2	Aplikasi fungsional utama 1*	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi pelayanan (ke publik atau instansi lain)		
3	Aplikasi fungsional utama 2*	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi administrasi dan manajemen		
4	Aplikasi fungsional utama 3*	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi spesifik tugas dan fungsi kementerian		
5	Aplikasi fungsional utama 4*	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi keuangan		
6	Aplikasi fungsional utama 5*	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi kepegawaian		
7	Dokumentasi	Adanya dokumentasi aplikasi yang digunakan (kode sumber, buku panduan, dokumen arsitektur atau desain, dokumen teknis, dokumen kebutuhan perangkat lunak, struktur data)		
8	Inventaris aplikasi TIK	Adanya dokumentasi mengenai inventaris aplikasi		
9	Interopabilitas	Adanya interopabilitas		
		Total Penilaian		



5. Perencanaan

No	Sub-Dimensi	Indikator	Status	Catatan
1	Pengorganisasian / Fungsi	Adanya fungsi yang melakukan perencanaan		
2	Penyusunan Perencanaan TIK	Adanya Penyusunan Perencanaan TIK		
3	Master Plan	Adanya master plan mengenai TIK		
4	Roadmap	Adanya Roadmap mengenai TIK		
5	Dokumentasi	Adanya rencana kerja yang terdokumentasi		
6	Anggaran	Adanya anggaran mengenai TIK		
Total Penilaian				

B. Hasil Penilaian Kominfo tingkat Kementerian menggunakan Kerangka PeGI tahun 2012-2014 (<http://pegi.layanan.go.id/tabel-hasil-peg-4/>)

1. Hasil Tabel PeGI Tahun 2012



PeGI Tingkat Kementerian

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Kementerian Keuangan	3.50	3.53	3.52	3.37	3.63	3.51	Baik
2	Kementerian Pekerjaan Umum	3.10	3.52	3.11	3.34	3.52	3.32	Baik
3	Kementerian Perindustrian	3.13	3.50	3.48	3.40	3.00	3.30	Baik
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3.17	3.27	3.40	3.22	3.13	3.24	Baik
5	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.10	2.96	2.83	2.94	3.16	3.00	Baik
6	Kementerian Perhubungan	2.79	2.70	2.90	2.92	2.77	2.82	Baik
7	Kementerian Perdagangan	2.73	2.73	3.19	2.92	2.40	2.79	Baik
8	Kementerian Pertahanan	2.84	3.10	2.68	2.50	2.75	2.77	Baik
9	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2.44	2.73	2.95	2.73	2.83	2.74	Baik
10	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	2.10	2.43	3.14	2.90	2.73	2.66	Baik
11	Kementerian Kesehatan	2.23	2.88	2.74	2.70	2.52	2.61	Baik
12	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1.98	2.63	2.98	2.67	2.73	2.60	Baik
13	Kementerian Kehutanan	2.54	2.80	2.93	2.62	1.67	2.51	Kurang
14	Kementerian Pertanian	2.63	3.03	2.69	2.37	1.67	2.48	Kurang
15	Kementerian Luar Negeri	2.15	2.44	2.77	2.40	2.40	2.43	Kurang
16	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2.17	2.33	2.26	2.63	2.70	2.42	Kurang
17	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.38	2.70	2.36	2.27	2.27	2.39	Kurang
18	Kementerian Riset dan Teknologi	2.10	2.87	2.55	2.60	1.70	2.36	Kurang
19	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.25	2.28	2.37	2.58	2.20	2.34	Kurang
20	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2.53	2.28	2.40	2.64	2.40	2.25	Kurang
21	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.40	2.60	2.10	2.45	1.37	2.22	Kurang
22	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.19	2.57	2.24	2.03	1.67	2.14	Kurang
23	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2.02	2.67	2.07	2.38	1.40	2.11	Kurang
24	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.03	2.44	1.80	2.08	1.44	1.96	Kurang
25	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1.50	2.00	1.94	2.10	2.12	1.93	Kurang
26	Kementerian Lingkungan Hidup	1.44	1.90	2.24	2.18	1.83	1.92	Kurang
27	Kementerian Agama	1.43	2.04	2.46	1.88	1.48	1.86	Kurang
28	Kementerian Perumahan Rakyat	1.38	1.83	1.90	2.23	1.30	1.73	Kurang
29	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.21	1.63	1.57	1.80	1.40	1.52	Sangat Kurang
RATA-RATA		2.29	2.63	2.61	2.58	2.29	2.48	Kurang

2. Hasil Tabel PeGI Tahun 2013



PeGI Tingkat Kementerian pada Tahun 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI					NILAI RAID-RAID	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRA STRUKTUR	APLIKA SI	PERENCANAAN		
1	Kementerian Keuangan	3.54	3.67	3.52	3.50	3.60	3.57	Sangat Baik
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3.69	3.30	3.50	3.40	2.80	3.44	Baik
3	Kementerian Pekerjaan Umum	2.96	3.35	3.43	3.03	3.27	3.21	Baik
4	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	3.17	3.00	3.29	3.37	3.13	3.19	Baik
5	Kementerian Luar Negeri	3.04	3.80	3.38	3.17	2.67	3.17	Baik
6	Kementerian Pertahanan	3.00	3.47	3.24	3.00	3.00	3.14	Baik
7	Kementerian Sekretariat Negara	2.79	3.07	3.33	2.97	3.33	3.10	Baik
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.94	3.00	3.36	2.90	3.10	3.06	Baik
9	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.79	3.27	3.10	2.93	2.80	2.98	Baik
10	Kementerian Perindustrian	2.79	2.93	3.38	2.97	2.20	2.85	Baik
11	Kementerian Perdagangan	2.88	2.87	3.52	3.07	1.87	2.84	Baik
12	Kementerian Pertanian	2.67	2.93	2.86	2.93	2.80	2.84	Baik
13	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.88	2.80	2.76	2.80	2.93	2.83	Baik
14	Kementerian Kesehatan	2.67	3.07	2.81	2.97	2.53	2.81	Baik
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2.71	2.67	2.52	2.83	2.73	2.69	Baik
16	Kementerian Perhubungan	2.54	2.80	2.57	2.77	2.67	2.67	Baik
17	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.50	2.80	2.82	2.73	2.60	2.65	Baik
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2.88	2.80	2.52	2.90	2.73	2.65	Baik
19	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.29	2.67	2.52	2.70	2.67	2.57	Baik
20	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2.29	2.27	2.52	2.90	2.53	2.50	Baik
21	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.80	2.53	2.33	2.57	2.53	2.49	Kurang
22	Kementerian Agama	2.17	2.67	2.71	2.50	2.27	2.46	Kurang
23	Kementerian Kehutanan	2.42	2.33	2.52	2.70	2.20	2.43	Kurang
24	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2.29	2.53	2.19	2.30	2.67	2.40	Kurang
25	Kementerian Riset dan Teknologi	2.13	2.53	2.76	2.53	1.73	2.34	Kurang
26	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.92	2.40	2.52	2.67	1.93	2.29	Kurang
27	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2.42	2.27	2.14	2.27	2.27	2.27	Kurang
28	Kementerian Sosial	1.83	2.27	2.62	2.57	1.53	2.16	Kurang
29	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.67	2.20	2.14	2.70	1.93	2.13	Kurang
30	Kementerian Perumahan Rakyat	1.94	1.80	2.43	2.50	1.90	2.11	Kurang
31	Kementerian Lingkungan Hidup	1.54	2.40	2.43	2.43	1.60	2.08	Kurang
32	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.58	1.67	2.29	1.93	1.87	1.87	Kurang
33	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.54	2.00	2.00	2.07	1.60	1.84	Kurang
RAID-RAID		2.51	2.73	2.78	2.76	2.48	2.66	Baik



3. Hasil Tabel PeGI Tahun 2014

PeGI Tingkat Kementerian pada Tahun 2014

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Kementerian Keuangan	3.54	3.6	3.67	3.5	3.53	3.57	Sangat Baik
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3.29	3.53	3.52	3.6	3.2	3.43	Baik
3	Kementerian Luar Negeri	3.13	3.4	3.36	3.25	3.4	3.31	Baik
4	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	3.25	3.27	3.38	3.2	3.2	3.26	Baik
5	Kementerian Pekerjaan Umum	2.96	3.27	3.43	3	3.13	3.16	Baik
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.13	3.4	2.95	3.17	2.8	3.09	Baik
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.75	3.2	3.29	3	2.9	3.03	Baik
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.83	3.13	3.29	2.83	2.8	2.98	Baik
9	Kementerian Perdagangan	2.92	2.87	3.1	3.03	2.87	2.96	Baik
10	Kementerian Kesehatan	2.79	2.93	3.14	3	2.87	2.95	Baik
11	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.79	2.8	3.24	2.93	2.87	2.93	Baik
12	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2.75	3.1	2.86	2.9	3	2.92	Baik
13	Kementerian Pertanian	3	2.53	2.95	2.93	3.07	2.9	Baik
14	Kementerian Sekretariat Negara	2.92	3.07	2.57	2.97	2.53	2.81	Baik
15	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.42	2.4	2.67	2.57	2.53	2.52	Baik
16	Kementerian Kehutanan	2.21	2.4	2.76	2.77	2.27	2.48	Kurang
17	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.96	2.73	2.57	2.5	2.6	2.47	Kurang
18	Kementerian Agama	2.38	2.8	2.79	2.55	1.7	2.44	Kurang
19	Kementerian Riset dan Teknologi	2.29	2.27	2.71	2.47	2.2	2.39	Kurang
20	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.21	2.53	2	2.43	2.6	2.35	Kurang
21	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2.25	2.33	2.24	2.3	2.53	2.33	Kurang
22	Kementerian Perhubungan	2.29	2.33	2.14	2.17	2.4	2.27	Kurang
23	Kementerian Sosial	2	2.33	2.24	2.63	2	2.24	Kurang
24	Kementerian Lingkungan Hidup	2	2.33	2.29	2.37	2.2	2.24	Kurang
25	Kementerian Pertahanan	2.42	2.33	2.05	2	2.33	2.23	Kurang
26	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.04	2.13	2.43	2.33	2.13	2.21	Kurang
27	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.92	2	2.19	2.47	2.2	2.15	Kurang
28	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1.63	2	1.71	2.9	2	2.05	Kurang
RATA-RATA		2.6	2.8	2.8	2.8	2.6	2.7	Baik

4. Hasil Tabel PeGI Tahun 2015

PeGI Tingkat Kementerian Tahun 2015

NO	KEMENTERIAN	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Kementerian Keuangan	3.60	3.73	3.67	3.60	3.73	3.67	SANGAT BAIK
2	Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah	3.20	3.53	3.53	3.50	3.27	3.41	BAIK
3	Kementerian Luar Negeri	3.30	3.40	3.23	3.27	3.40	3.32	BAIK
4	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	3.27	3.20	3.33	3.20	3.20	3.24	BAIK
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.07	3.10	3.43	3.03	3.17	3.16	BAIK
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.15	3.24	3.20	3.28	2.88	3.15	BAIK
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.20	3.07	2.97	3.23	3.07	3.11	BAIK
8	Kementerian Kesehatan	3.03	3.00	3.17	3.03	2.83	3.01	BAIK
9	Kementerian Perhubungan	3.07	3.00	3.13	2.73	2.87	2.96	BAIK
10	Kementerian Perdagangan	2.80	2.67	3.07	3.13	2.80	2.89	BAIK
11	Kementerian Pertanian	2.67	2.80	2.87	2.93	3.00	2.85	BAIK
12	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2.80	2.80	2.87	2.80	2.87	2.83	BAIK
13	Kementerian Pertahanan	2.60	2.67	2.73	2.53	2.87	2.68	BAIK
14	Kementerian Hukum dan HAM	2.78	2.42	2.53	3.03	2.57	2.67	BAIK
15	Kementerian Sekretariat Negara	2.63	2.63	2.55	2.85	2.40	2.61	BAIK
16	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2.20	2.33	3.33	2.53	2.33	2.55	BAIK
17	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.42	2.18	2.30	2.57	2.95	2.48	KURANG
18	Kementerian Agama	2.47	2.20	2.80	2.93	1.80	2.44	KURANG
19	Kementerian Ketenagakerjaan	2.27	2.20	2.33	2.53	2.40	2.35	KURANG
20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.43	1.98	2.34	2.40	2.07	2.24	KURANG
21	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2.07	2.07	2.20	2.07	2.00	2.08	KURANG
22	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2.30	1.70	2.13	2.27	1.83	2.05	KURANG
23	Kementerian Pariwisata	2.27	1.93	2.20	2.07	1.73	2.04	KURANG
24	Kementerian Sosial	1.73	2.00	2.60	1.87	1.93	2.03	KURANG
25	Kementerian Dalam Negeri	1.77	2.13	2.27	2.40	1.53	2.02	KURANG
26	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.73	1.73	2.43	2.37	1.53	1.96	KURANG
27	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1.53	1.73	2.07	1.87	1.53	1.75	KURANG
RATA-RATA		2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.7	BAIK